**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPKIR, DAN PROPOSISI**

* 1. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian.

* + 1. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitiannya serta menunjukkan keaslian dari peneliti. Berikut meruapakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang peneliti kaji:

1. Nurul Ulfa Nainggolan. Skripsi (2021) dengan judul “Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan”.

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program Duta Genre dan hambatannya, program Duta Genre merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan yang khususnya remaja, dimana fenomena saat ini kurangnya pengawasan dan ketegasan orangtua dalam mendidik anaknya sehingga terjadi perilaku menyimpang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Duta Genre sudah cukup baik namun belum berjalan efektif hal ini dilihat dengan indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, kemudian hambatan dalam implementasi yaitu penyuluh Keluarga Berencana tidak lagi turun ke lokasi sasaran kegiatan semenjak adanya pandemi Covid-19 dan kurangnya sumber daya manusia atau implementor dalam melakukan penyuluhan kepada remaja. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian, lalu persamaanya yaitu teori yang digunakan untuk analisis yaitu mengunakan teori Impelementasi Kebijakan Edward III, dan fokus penelitian yang membahas penerapan program GenRe untuk meningkatkan kualitas remaja.

1. Neng Nika Ferlina. Skripsi (2019) dengan judul “Personal Branding Duta Genre 2019 Kota Bandung”.

Penelitian ini membahas bagaimana tanggapan remaja di Kota Bandung mengenai adanya Duta Genre untuk membentuk remaja menjadi remaja yang terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, karena saat ini remaja di Kota Bandung hidup didalam keterbukaan, kebebasan berekspresi dan terpapar berbagai informasi sehingga bisa muncul persoalan apabila tidak diarahkan ke arah yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya Duta Genre mampu memunculkan keyakinan dan kepercayaan bagi remaja agar menjadi remaja yang terhindar dari penyimpangan dan dapat merencanakan kehidupan yang lebih baik. Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan untuk analisis dan fokus penelitian, lalu persamaanya yaitu lokasi penelitian yang sama-sama dilakukan di Kota Bandung.

1. Budi Mulyawan dan Nisa Mailiyatuzzahro. Jurnal (2021) dengan judul “Implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu”.

Penelitian ini membahas bagaimana impelementasi program Genre di Kabupaten Indramayu dengan mengambil lokus di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lelea dan Kecamatan Banodua. Hasil penelitian menunjukkan program GenRe di Kabupaten Indramayu tidak berjalan signifikan dan cenderung mengalami stagnasi di beberapa wilayah dan faktor ini dikarenakan diantaranya petugas PLKB kecamatan yang kurang maksimal saat terjun ke masyarakat, kemudian komunikasi antara instansi yang menangani ini (DPPKB Kabupaten Indramayu, UPTD PPKB dan petugas PLKB) dengan pemangku otoritas wilayah setempat kurang berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan untuk analisis, lokasi penelitian, lalu persamaanya yaitu fokus penelitian yang membahas penerapan program GenRe untuk meningkatkan kualitas remaja.

1. Antartila Rezki Aziz. Jurnal (2021) dengan judul “Penerapan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Palembang”.

Penelitian ini membahas penerapan program Genre yang dimana program ini berfokus pada pembinaan remaja agar terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza) kemudian mengarahkan remaja yang sehat, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan program Genre memiliki dua pendekatan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK) dan melaksanakan program ini dengan startegi pendekatan, ramah remaja, pembelajaran, pelembagaan dan pencapaian. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah BKKBN Kota Palembang sebaikanya membuat SOP yag lebih jelas untuk melaksanakan program pada saat membuat perencanaan program, lebih meningkatkan sosialisasi dengan lembaga terkait untuk mengembangkan program ini karena tidak semua remaja mengetahui keberadaannya, dan mengadakan suatu kegiatan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan pencapaian targetnya. Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan untuk analisis, lokasi penelitian, lalu persamaanya yaitu fokus penelitian yang membahas penerapan program GenRe untuk meningkatkan kualitas remaja.

1. Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita. Jurnal (2017) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Yogyakarta”.

Penelitian ini membahas bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Yogyakarta beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Yogyakarta belum efektif dilihat dari lima indikator: (1) Kebijakan belum efektif dalam mengatasi permasalahan remaja. (2) Pelaksana cukup efektif dilihat dari pembagian tugas dan kewenangan meskipun memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, (3) Target belum efektif karena target yang diintervensi belum siap mendukung Program GenRe, (4) Lingkungan kebijakan sudah efektif namun lingkungan ekternal belum efektif, dan (5) Proses belum efektif karena remaja dan keluarga yang mempunyai remaja belum memahami substansi Program GenRe. Faktor pendukungnya yaitu kemudahan dari komunikasi dan adanya pelatihan konseling, beberapa penghambat antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, adanya penyimpangan moral, dan keterbatasan waktu. Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan untuk analisis, lokasi penelitian, dan fokus penelitian, lalu persamaanya yaitu menggunakan program GenRe untuk meningkatkan kualitas remaja.

**Tabel 2.1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
| Teori Yangdigunakan | Pendekatan | Metode | TeknisAnalisis |
| 1. | Nurul Ulfa Nainggolan  | Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan  | Teori Edward III:1. Komunikasi2. Sumber daya3. Disposisi 4. Struktur organisasi  | Kualitatif | Deskriptif | Reduksi data,Penyajian data, dan Kesimpulan |
| 2. | Neng Nika Ferlina  | Personal Branding Duta Genre 2019 Kota Bandung  | Teori *Eight law of Personal Branding* dari Peter Montoya  | Kualitatif  | Deskritif  | Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi  |
| 3. | Budi Mulyawan, Nisa Mailiyatuzzahro  | Implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu  | Model van Meter dan van Horn | Kualitatif | Deskriptif | Reduksi data, Pemaparan data dan Penarikan kesimpulan  |
| 4. | Antartila Rezki Aziz | Penerapan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Palembang  | Seers (1969) di pertimbangan nilai. Riggs (1966) orientasi nilai yang menguntungkan  | Kualitatif | Deskriptif | Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan |
| 5. | Dwi Wiliantining,Lena Satlita  | Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Yogyakarta  | Keefektivan kebijakan menurut Riant Nugroho (2018) | Kualitatif | Deskriptif | Analisis Interaktif  |

Berdasarkan tabel diatas maka perbedaan penelitian yang dilakukan adalah lokus dan fokusnya sehingga memberikan fakta bahwa penelitian ini tidak plagiat.

**2.1.2. Kajian Administrasi dan Administrasi Publik**

**1) Pengertian Administrasi**

Menurut Hardi dkk (2019) dalam bukunya Teori Administrasi menyatakan administrasi adalah “semua kegiatan yang mengandung unsur-unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerja sama serta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada kegiatan yang mengandung unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Mariati (2017) dalam bukunya Ilmu Administrasi menyatakan administrasi adalah “segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.” Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada proses usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut Indra dan Sufian (2013) dalam bukunya Administrasi, Organisasi, dan Manajemen menyatakan administrasi sebagai berikut:

“Administrasi sebagai seni yaitu proses yang diketahui hanya permulaannya saja. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu yaitu karena adanya unsur-unsur tertentu itukah yang menjadikan adanya sesuatu itu. Administrasi sebagai proses kerjasama yakni sebagai suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya 2 orang yang bersepakat untuk mencapai tujuan.”

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada proses kerja sama yang dimulai dengan adanya dua orang yang berseakat untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagian yang dikutip Pasolong (2014:3) dalam bukunya Teori Administrasi Publik yang mengemukakan pengertian Administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya.” Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada proses kegiatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tjuan yang telah ditentukan.

Menurut Ulbert Silalahi M.A dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi yang dikutip dalam Niara (2016:128) administrasi memiliki dua arti yaitu arti secara semit dan arti secara luas yaitu: “Kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada kerja sama sekelompok orang yang memiliki tugas sesuai struktur untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern mengatakan bahwa “administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi pada kerja sama untuk mencapai tujuan sebelumnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan lebih dari dua orang dan didalamnya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

**2). Pengertian Administrasi Publik**

Menurut Raja dan Darma (2021) dalam bukunya Administrasi Publik menyatakan Administrasi Publik sebagai berikut:

“Ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Administrasi Publik pada ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam bernegara yaitu meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Menurut Sitna (2022) dalam bukunya Pengantar Administrasi Publik menyatakan Administrasi Publik sebagai berikut:

“Diibaratkan sebagai tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (publik). Administrasi publik digunakan untuk lebih memahami hubungan tersebut dan dapat meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan publik demi keefektiifan dan keefesienan pelaksanaanya. Dalam pengembangan administrasi publik harus memperlihatkan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau eksistensi dari suatu bidang yang dikelolanya, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya dari lingkungan luar”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Administrasi Publik pada tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat untuk lebih memahami dan meningkatkan tanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Isnaini et.al (2021) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Publik menyatakan Administrasi Publik sebagai berikut:

“Rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik secara efektif dan efisien. Serta yang menjadi tugas utama dari administrasi publik adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik dan kemudian melaksakannya”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Administrasi Publik pada perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Beddy (2017) dalam bukunya Dasar-Dasar Administrasi Publik menyatakan Administrasi Publik sebagai berikut:

“Suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur negara atau pemerintah dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik.”

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Administrasi Publik pada proses kerja sama yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan untuk tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik.

Menurut Dwight Waldo (1971) dalam bukunya Pengantar Studi *Public Administration* menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah “organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/negara”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Administrasi Publik pada organisasi, manusia dan material untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Chandler dan Plano dalam buku Teori Administrasi Publik yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2017:8) berpendapat bahwa Administrasi publik adalah “proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan administrasi publik pada proses personel publik yang memiliki sumber daya untuk mengatasi permasalahan publik, memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah aktivitas pemerintah yang memiliki tujuan dan sasaranan serta berhubungan dengan sektor swasta untuk memberikan pelayanan dan mengatasi permasalahan publik, memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

**2.1.3. Kajian Kebijakan Publik**

Menurut Sitna (2022) dalam bukunya Pengantar Administrasi Publik menyatakan Kebijakan Publik sebagai berikut:

“Sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Kebijakan Publik pada konsep yang menjadi garis dasar dalam masalah yang kemudian menjadi rencana dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Menurut Taufiqurakhman (2014) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Publik menyatakan Kebijakan Publik sebagai berikut:

“Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat dengan lingkup sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Kebijakan Publik pada keputusan kebijakan yang diambil oleh sekelomok orang untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam masyarakat dengan berbagai lingkup dan sektor.

Menurut Afriva (2017) dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik menyatakan Kebijakan Publik sebagai berikut:

“Keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Kebijakan Publik pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan negara yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye dalam Sodikin (2017)menyatakan bahwa “*Public Policy is what ever the goverment choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan)”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan kebijakan publik pada apapun yang dilakukan oleh pemerintah baik akan dilakukan ataupun tidak.

Menurut Nugroho (2012:123) mendefinisikan secara sederhana bahwa kebijakan publik merupakan “keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik juga strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan kebijakan publik pada keputusan yang dibuat negara sebagai strategi untuk mengatur masyarakat.

Menurut Woll dalam Henrizal dan Satibi (2019) berpendapat Kebijakan Publik adalah “sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan kebijakan publik pada aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat, memecahkan permasalahan dan menjalankan negara memalui lembaga yang ada sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat.

**2.1.4. Kajian Implementasi Kebijakan Publik**

**1). Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.**

Menurut Novita dan Noverman (2021) dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik menyatakan Impelementasi Kebijakan sebagai berikut:

“Studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah atau lokasi tertentu, dan sebagai upaya untuk memahami fenomena yang dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi munculnya berbagai fenomena yang terjadi, apa sebenarya faktor yang memengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu impelementasi kebijakan ”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Implementasi Kebijakan Publik pada upaya untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik dapat gagal di daerah tertentu, apa faktor yang memengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan di daerah tersebut.

Menurut Joko (2020) dalam bukunya Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik menyatakan Implementasi Kebijakan Publik sebagai berikut:

“Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Implementasi Kebijakan Publik pada rumusan yang dibuat untuk dilaksanakan agar mencapai tujuan tertentu dengan saranan dan urutan waktu tertentu.

Menurut Tachjan (2006 ) dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik menyatakan Implementasi Kebijakan Publik sebagai berikut:

“Sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis”.

Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan Implementasi Kebijakan Publik pada pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Henrizal dan Satibi (2019) Implementasi kebijakan publik adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan implementasi kebijakan publik pada tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah untuk mengarahkan tujuan melalui keputusan kebijakan.

Menurut Hinggis yang dikutip oleh Pasolong (2011:57) menyatakan bahwa “Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya menggunakan sumber daya manusia dan menggunakan umber daya lain untuk mencapai sasaran strategis”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan implementasi kebijakan publik pada rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia mengunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran.

Menurut Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) menyatakan bahwa “Impelementasi suatu proses dari adanya sebuah hasil yang dapat diukur dan dilihat atas keberhasilan implementasi kebijakan demi tercapainya atau tidaknya tujuan hasil akhir atau tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam kebijakan”. Berdasarkan teori diatas peneliti menekankan implementasi kebijakan publik pada proses dari adanya hasil yang dapat diukur dan dilihat keberhasilannya atas tercapainya hasil atau tujuan yang diraih dalam kebijakan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan rangkuman dari berbagai kegiatan yang hasilnya dapat diukur dan keberhasilannya dilihat dari tercapai atau tidaknya hasil dari kebijakan yang dibuat.

**2). Model- model Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan telaah peneliti terhadap jurnal Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik maka Model Implementasi Kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Hogwood dan Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

* 1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
	2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dansumberdaya yang cukup memadahi.
	3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi.
	4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
	5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
	6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
	7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
	8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
	9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
	10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
1. Model Smith

Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan. Keempat variable dalam implementasi kebijakan tersebut ditampilkan dengan jelas, yaitu Tacjhan (dalam Wattimena Pieter 2016).

a. Kebijakan yang diidealkan, yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.

* 1. Kelompok sasaran (target group), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
	2. Implementating organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
	3. Enfironemental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
1. Model Merilee S. Grindle

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980) pendekatannya dikenal dengan Implementation as A Polticial and Administration Process.Ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan public. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan public diukur dari proses pencapaian hasil hasil (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran implementasi kebijakan tesebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

* 1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
	2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yang tercakup dalam kerangka pemikiran berdasarkan pertanyaan atas dua pertanyaan pokok, yaitu : 1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerima kelompok sasaran dan perbahan terjadi.
1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

1. Model Macolm Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan” (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

1. Model Charles Jones

Charles Jones (dalam Aneta, 2010) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga hal aktivitas utama kegiatan, yaitu : a) Organisasi pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, b) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, c) Apabila (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

1. Model Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III dikenal dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurutnya, ada empat (4) faktor yang menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik, keempat faktor tersebut meliputi (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi.

1. Model Jan Merse

Jan Merse (dalam Koryati, 2014) mengemukakan bahwa “Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) Informasi, b) Isi kebijakan, c) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan d) Pembangunan potensi.

**3). Faktor Memengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan dihasilkan oleh variabel atau faktor yang berhubungan satu sama lainnya. Menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining (Tahir, 2014:76) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Logika kebijakan adalah suatu pengetahuan tentang aturan dan dasar hukum yang menyajikan sesuatu kedalam kebenaran yang dimana kebijakan tersebut adalah suatu hal untuk merujuk kedalam kebenaran.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan atau dilaksanakan merupakan tempat kebijakan itu diimplementasikan. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan menjadi hal yang penting karena kondisi lingkungan akan mempengaruhi hasil akhir dari implementasi kebijakan tersebut.
3. Kemampuan implementor kebijakan merupakan suatu keahlian dari setiap implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemampuan implementor kebijakan menjadi penting dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan implementor harus cepat tanggap dalam menghadapi situasi agar kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan ketentuannya.
	1. **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti sebagai dasar untuk memperkuat fokus yang menjadi latar belakang penelitian ini, dengan adanya kerangka berpikir dapat menyusun secara sistematis dan rasional masalah yang telah dirumuskan sehingga dapat diterima secara akal. Peneliti menggunakan teori tentang implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Henrizal & Satibi (2019) yang mengemukakan bahwa: *“policy implementation ..is the sage of policy-making between establishment of a policy..and the consequences of the policy for the people whom it effects”* (Implementasi kebijakan merupakan bagian dari keuntungan pengambilan keputusan diantara kebijakan yang sudah dibuat dan konsekuensinya terhadap masyarakat yang terkena dampak). Kemudian peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III dalam Henrizal dan Satibi (2019) yang dikenal dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation* karena sesuai dengan permasalahan yang peneliti temukan dengan memanfaatkan studi literatur. Menurut Edwards III dalam Henrizal dan Satibi (2019) , ada empat (4) faktor yang menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi yang dijelaskan sebagai berikut:

* + 1. Komunikasi, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
		2. Sumber Daya, dalam perspektif organisasi yang termasuk sumber daya organisasi ialah sumber daya manusia, sumber daya modal berupa uang dan material atau bahan baku, informasi, mesin-mesin, peralatan. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan baik diantaranya staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
		3. Disposisi, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan yang harus mengetahui apa yang akan dikerjakan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting yang harus diperhatikan untuk memahami faktor disposisi ini ialah Pengangkatan birokrat dan Insentif.
		4. Struktur Birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan, karakteristik tersebut meliputi: Melaksanakan *standard operating procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Selanjutnya peneliti menyajikan uraian kerangka berpikir dalam bentuk sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Program Duta GenRe di DPPKB Kota Bandung

Pendekatan Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam Henrizal dan Satibi (2019):

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
5. Struktur Birokrasi

Terwujudnya penurunan angka pernikahan dini di Kota Bandung

Gambar 2.1

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

* 1. **Proposisi**

Proposisi adalah dugaan sementara dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti paparkan, maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

* 1. Implementasi program duta Genre di Kota Bandung dapat berjalan optimal apabila sosialisasi yang dilakukan oleh Duta GenRe dilakukan secara menyeluruh dengan menjalankan tugas yang sesuai dengan arahan dan menjalaninya penuh dengan komitmen dan kemampuan.
	2. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Duta GenRe yaitu kurangnya partisipasi dan kerja sama masyarakat sehingga program kurang berjalan dengan optimal di Kota Bandung.